

Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan pada Sektor Perkebunan Kelapa di Kabupaten Asahan

***Ahmed Fernanda Desky¹, Nabila Yasmin², Mhd. Reza Ardillah³**

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, ahmedfernandadesky@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, nabilayasmin@uinsu.ac.id

³Mahasiswa Doktor Ilmu Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru,
muhammad.reza6075@grad.unri.ac.id

Abstract

People's coconut commodities have a strategic role for the economy of coastal communities, but their development is still faced with structural, institutional, and low technology utilization. This study aims to analyze the practice of social engineering in sustainable empowerment in the coconut farming community in Asahan Regency by examining the structure-agency relationship that affects the sustainability of the business and the welfare of farmer families from the upstream to downstream sectors. The research uses a qualitative approach with case study methods in Silau Lama Village, Silo Bonto Village, and Central Sei Kepayang Village. The research informants consisted of six people, including coconut farmers, value chain actors, and village government members, who were selected through purposive sampling. Data was collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies, then analyzed interactively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that coconut cultivation practices are still dominated by traditional knowledge, minimal replanting, and weak farmer institutions, so that the productivity and bargaining position of farmers are low. In the downstream sector, the coconut value chain is informal and hierarchical with a high dependence on agents and fluctuations in market prices. Structure-agency relationships show that farmers tend to reproduce old practices as survival strategies due to limited policy and institutional support. This research provides theoretical benefit in enriching the study of rural sociology regarding social engineering and structure-agency relations in farming communities, as well as practical benefits as a reference for the formulation of policies to strengthen institutions and downstream people's coconuts. This study recommends the formation of farmer collective institutions, replanting based on mutual cooperation, sustainable mentoring, and the development of integrated upstream-downstream coconuts to improve the welfare of farmers in a sustainable manner.

Keywords: *Community Empowerment, Coconut Farmers Community, Structure Agencies, Rural Sociology*

Abstrak

Komoditas kelapa rakyat memiliki peran strategis bagi perekonomian masyarakat pesisir, namun pengembangannya masih dihadapkan pada persoalan struktural, kelembagaan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik rekayasa sosial dalam pemberdayaan berkelanjutan pada komunitas petani kelapa di Kabupaten Asahan dengan menelaah relasi struktur-agensi yang memengaruhi keberlanjutan usaha dan kesejahteraan keluarga petani dari sektor hulu hingga hilir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Silau Lama, Desa Silo Bonto, dan Desa Sei Kepayang Tengah. Informan penelitian berjumlah

enam orang yang terdiri atas petani kelapa, pelaku rantai nilai, dan pemerintah desa, yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik budidaya kelapa masih didominasi pengetahuan tradisional, minim replanting, serta lemahnya kelembagaan petani, sehingga produktivitas dan posisi tawar petani rendah. Di sektor hilir, rantai nilai kelapa bersifat informal dan hierarkis dengan ketergantungan tinggi pada agen serta fluktuasi harga pasar. Relasi struktur–agensi memperlihatkan bahwa petani cenderung mereproduksi praktik lama sebagai strategi bertahan hidup akibat keterbatasan dukungan kebijakan dan kelembagaan. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya kajian sosiologi pedesaan mengenai rekayasa sosial dan relasi struktur–agensi pada komunitas petani, serta manfaat praktis sebagai rujukan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan hilirisasi kelapa rakyat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kelembagaan kolektif petani, replanting berbasis gotong royong, pendampingan berkelanjutan, serta pengembangan hilirisasi kelapa terintegrasi hulu–hilir guna meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas Petani Kelapa, Struktur–Agensi, Sosiologi Pedesaan*

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi agraris yang besar, terutama melalui sektor pertanian rakyat yang menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat pedesaan. Komoditas pertanian rakyat dikelola secara mandiri oleh petani, mulai dari penguasaan lahan, proses budidaya, hingga pengelolaan dan distribusi hasil panen. Beragam komoditas seperti padi, jagung, kelapa, kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan nasional, tetapi juga berperan strategis dalam ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, sektor pertanian rakyat masih menghadapi persoalan mendasar berupa rendahnya produktivitas dan efisiensi, terutama akibat keterbatasan pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna.

Jamaluddin et al. (2019) mengatakan rendahnya pengetahuan di bidang mekanisasi pertanian membuat petani dan pelaku usaha tani kesulitan untuk memilih mesin dan peralatan pertanian yang tepat. Sebab, memilih teknologi peralatan dan mesin pertanian yang tepat sangat penting karena menentukan apakah proses produksi

lebih efisien dan efektif, sehingga mampu meningkatkan mutu dan produktivitas pertanian. Hasil penelitian Nurhanifa & Budiasih (2023) dalam aspek ekonomi juga menemukan bahwa tingkat produktivitas sektor pertanian di Jawa terbilang masih rendah karena belum mampu mencapai tingkat produksi maksimalnya karena proses produksi yang belum sepenuhnya efisien. Senada dengan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kurniwan (2013), kendala dalam pemberdayaan petani disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan jumlah penyuluh yang tersedia untuk mendampingi para petani.

Berbagai permasalahan pertanian rakyat dipicu oleh keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, minimnya pendampingan dan pelatihan, serta keterbatasan modal usaha. Di sisi lain, panjangnya rantai distribusi menyebabkan harga jual di tingkat petani relatif rendah, sehingga pendapatan petani kecil cenderung stagnan dan kerap tidak mencukupi kebutuhan dasar. Berbagai upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat telah dilakukan, dan sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan komunitas

petani memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha pertanian rakyat (Astuti and Wijaya 2020), pengembangan kelembagaan komunitas (Abidin 2021), reorientasi subsidi pupuk (Kariyasa 2005), program kredit usaha rakyat (Afnani, Arifin, and Gunawan 2020), serta pengembangan teknologi dan inovasi pertanian (Karouw, Santosa, and Maskromo 2019).

Upaya penanganan persoalan pertanian rakyat kerap tidak berjalan optimal akibat kompleksitas birokrasi dan lemahnya koordinasi di tingkat daerah. Padahal, komoditas pertanian rakyat semestinya memiliki peluang pengembangan yang setara dengan komoditas pertanian korporasi yang dikelola secara terorganisir, profesional, dan berstandar internasional. Selama ini, kebijakan dan investasi lebih banyak diarahkan pada komoditas korporasi seperti kelapa sawit, karet, tebu, kopi, dan kehutanan, sementara sejumlah komoditas rakyat yang berpotensi tinggi, seperti kelapa, relatif terabaikan. Minimnya perhatian terhadap perkebunan kelapa yang umumnya berada di wilayah pesisir begitu kontras dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar dunia dengan kontribusi signifikan terhadap produksi global.

Data Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar kedua di dunia, dengan iklim tropis yang sangat cocok untuk menanam pohon ini dengan luas areal 3,34 juta hektar, menghasilkan setara daging kelapa sebanyak 2,87 juta ton atau sekitar 24% dari produksi dunia. Selama empat dekade terakhir, sejak tahun 1980, Filipina, Indonesia, dan India telah menjadi tiga negara penghasil kelapa terbesar di dunia, menyumbang 71% produksi kelapa global pada tahun 2022. Pada saat yang sama, negara Brazil mencatat pertumbuhan produksi kelapa tertinggi dari tahun 1980 hingga 2022, peningkatan 67% atau 482 ribu ton dalam lebih

dari empat dekade (Bappenas 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan dalam pengembangan komoditas pertanian rakyat yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi strategis bagi perekonomian nasional.

Strategi hilirisasi kelapa rakyat melalui pengolahan hasil panen menjadi beragam produk bernilai tambah seperti kopra, minyak kelapa, gula kelapa, santan, hingga produk turunan berbasis tempurung dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing komoditas. Data Bappenas (2024), menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tetap menjadi produsen kelapa utama dunia, posisinya telah tergeser oleh Filipina yang menerapkan sistem pertanian kelapa lebih terorganisir dan produktif. Rendahnya produktivitas domestik menjadi tantangan utama bagi Indonesia untuk kembali memperkuat posisi global, sehingga pengembangan perkebunan kelapa perlu mendapat perhatian serius seiring tingginya permintaan pasar dan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap komoditas ini.

Berdasarkan data BPS (2022), produksi kelapa di Provinsi Sumatera Utara masih relatif rendah meskipun wilayah pesisirnya memiliki potensi besar, terutama di Kabupaten Asahan yang memiliki areal kelapa rakyat luas dan posisi geografis strategis untuk akses pasar regional. Berdasarkan data BPS Kabupaten Asahan (2022), komoditas pertanian kelapa di Kabupaten Asahan tahun 2021 mencapai 22.293,11 ton dengan luas tanaman mencapai 22.882,44 hektar. Sebaran wilayah komoditas pertanian kelapa terletak di wilayah Kecamatan Silau Laut, Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur, dan Tanjung Balai merupakan penghasil kelapa terbesar di Kabupaten Asahan milik usaha pertanian rakyat. Wilayah ini merepresentasikan dinamika pertanian kelapa rakyat dari hulu hingga hilir yang dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, seperti

keterbatasan sumber daya petani, lemahnya kelembagaan, rendahnya akses teknologi, serta kurang terintegrasinya kebijakan daerah.

Petani kelapa berada pada persimpangan jalan antara tradisi pertanian dan tekanan modernisasi yang memengaruhi keberlanjutan usaha dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan rekayasa sosial berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan analitis untuk memahami relasi antara struktur sosial dan agensi petani dalam mendorong transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani kelapa. Secara sosiologis, keberadaan modal sosial berupa gotong royong dan kesiapan partisipasi masyarakat menjadi sumber daya penting yang dapat dimobilisasi dalam proses perubahan (Putnam 2000).

Pengelolaan perkebunan kelapa yang berkelanjutan menuntut sistem perawatan yang baik serta peran aktif petani dan pelaku rantai nilai dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas sosial menunjukkan adanya potensi rekayasa sosial yang dapat mendorong perubahan, yang tercermin dari ketimpangan akses pasar dan harga (Scott 1985), rendahnya kapasitas teknologi petani Jamaluddin et al. (2019), lemahnya kelembagaan (Abidin 2021), keterbatasan modal dan infrastruktur (Afnani et al. 2020), serta belum optimalnya pemanfaatan lahan kelapa (Bappenas 2024), yang secara keseluruhan menempatkan petani pada posisi rentan (Raho 2013; Sabarisman 2017). Oleh karena itu, diperlukan rekayasa sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang peka terhadap kondisi ekologis, budaya, dan relasi sosial lokal agar transformasi sosial-ekonomi petani kelapa dapat berlangsung secara berkelanjutan (Kamim 2019; Perdana 2016).

Dalam perspektif sosiologis, rekayasa sosial berangkat dari asumsi bahwa masyarakat

bersifat dinamis dan dapat diarahkan melalui intervensi rasional berbasis pengetahuan ilmiah (Maliki 2012). Anthony Giddens (dalam Wirawan 2015:292) melalui *Structuration Theory* menekankan bahwa perubahan sosial lahir dari relasi dialektis antara agen dan struktur, di mana petani tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor aktif yang mampu mereproduksi atau mentransformasi struktur sosial melalui praktik sehari-hari. Pierre Bourdieu (dalam Wirawan 2015:275–76), melengkapi konteks rekayasa sosial melalui konsep habitus, modal, dan ranah (field) sebagai alat analitis untuk memahami perubahan sosial secara lebih mendalam. Rekayasa sosial dipandang sebagai proses transformasi disposisi individu (habitus), pengelolaan dan redistribusi modal ekonomi, sosial, dan budaya, serta restrukturisasi ranah sosial yang melanggengkan ketimpangan.

Trimerani et al. (2024) menekankan pentingnya integrasi pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, interaksi sosial, dan teknologi techno-social, sementara Srisasmita Dahlan et al. (2021) menemukan bahwa pendekatan berbasis teknologi belum efektif akibat rendahnya kapasitas SDM petani dan dominasi program jangka pendek. Kajian Rizghina Ikhwan et al. (2023) menunjukkan perlunya sensitivitas gender dalam rekayasa sosial, sedangkan Inka Mila Rizky (2022) mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi kelapa daerah masih belum optimal karena inefisiensi rantai perdagangan. Sementara itu, Karimah dan Widodo (2023) menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani memerlukan dukungan pasar, infrastruktur, dan sertifikasi yang hingga kini masih terbatas.

Meskipun komunitas petani kelapa dihadapkan pada persoalan struktural yang kompleks, mereka memiliki peluang signifikan untuk diberdayakan melalui rekayasa sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, kontekstual, dan melibatkan aktor lintas sektor

guna menjawab persoalan sektor hulu hingga hilir serta menghadapi tantangan keberlanjutan di masa depan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rekayasa sosial sebagai praktik sosial dalam kehidupan petani kelapa di Kabupaten Asahan dari sektor hulu hingga hilir. Menganalisis relasi struktur dan agensi dalam membentuk keberlanjutan usaha dan kesejahteraan keluarga petani kelapa. Mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan sosial yang menghambat pelebagaan pemberdayaan komunitas petani kelapa, serta merumuskan model rekayasa sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang kontekstual dan berkelanjutan.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya kajian sosiologi pedesaan mengenai relasi struktur–agensi dan rekayasa sosial dalam pemberdayaan komunitas petani kelapa. Secara praktis, penelitian ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan hilirisasi kelapa rakyat yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi komunitas petani sebagai dasar penguatan solidaritas sosial, posisi tawar, dan kesejahteraan ekonomi keluarga petani kelapa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya komunitas petani kelapa. Studi kasus dipilih karena mampu menyajikan deskripsi utuh dan kontekstual atas suatu entitas sosial tertentu (Naamy 2019:112). Pendekatan ini relevan untuk mengungkap praktik lokal, relasi kelembagaan, serta potensi rekayasa sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkembang pada komunitas petani kelapa dari

sektor hulu hingga hilir. Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Asahan tepatnya di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang, Desa Silo Lama dan Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut karena letaknya yang strategis berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga berpotensi tinggi dalam aktivitas ekspor hasil produk kelapa.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian. Biasanya *purposive sampling* dipergunakan untuk menentukan informan, dimana informan dipilih dengan pertimbangan tertentu dengan maksud tercapainya tujuan penelitian (Bungin, 2011:132). Subjek penelitian ditentukan melalui *purposive sampling* dengan melibatkan enam informan yang terdiri atas petani kelapa, pelaku rantai nilai dan pemerintah desa guna merepresentasikan perspektif produksi, kelembagaan, ekonomi, kebijakan, dan budaya (Naamy 2019:112). Objek penelitian berlokasi di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang dipilih sebagai wilayah pesisir strategis namun belum optimal dalam mendorong kesejahteraan petani kelapa.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan komunitas petani kelapa dan pemangku kepentingan terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen resmi, laporan institusi, dan literatur pendukung (Sugiyono 2013:240). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi data (Nurfajriani et al. 2016). Penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2013), yang mengatakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara

berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang valid dan konsisten.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Geografis dan Sistem Perkebunan Kelapa Rakyat di Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa di pesisir timur Sumatera Utara dengan kondisi geografis dataran rendah dan iklim tropis yang mendukung budidaya kelapa. Berdasarkan data *Kabupaten Asahan dalam Angka* (Badan Pusat Statistik 2025), pada tahun 2024 produksi kelapa mencapai 19.327,81 ton dari luas lahan 20.820,19 hektar, dengan Kecamatan Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur, dan Tanjung Balai sebagai wilayah penghasil utama. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Silau Laut (Desa Silau Lama dan Desa Silo Bonto) serta Kecamatan Sei Kepayang (Desa Sei Kepayang Tengah). Silau Laut tercatat sebagai kecamatan dengan areal perkebunan kelapa rakyat terluas, yakni sekitar 6.623,00 hektar dengan produksi kopra 3.545,00 ton, sementara Sei Kepayang memiliki produktivitas relatif tinggi dengan produksi sekitar 3.978,03 ton dari lahan seluas 3.613,35 hektar (Badan Pusat Statistik 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa kelapa menjadi sumber penghidupan utama masyarakat desa di wilayah penelitian, baik melalui budidaya maupun usaha turunannya, dengan aktivitas ekonomi yang berpusat pada pengelolaan dan distribusi hasil kelapa menuju pusat industri Asahan. Secara sosiologis, perkebunan kelapa di pesisir Asahan tidak hanya berfungsi sebagai basis ekonomi agraris, tetapi juga membentuk relasi sosial, distribusi modal, dan habitus kerja petani yang mereproduksi ketimpangan sekaligus membuka ruang bagi rekayasa sosial berbasis pemberdayaan, sehingga kelapa berperan penting dalam membentuk struktur sosial,

budaya kerja, dan identitas masyarakat pedesaan.

2. Rekayasa Sosial sebagai Praktik Sosial Petani Kelapa

a. Praktik Sosial Petani Kelapa Sektor Hulu

Petani kelapa di Kabupaten Asahan pada sektor hulu menunjukkan bahwa petani kelapa masih menggantungkan sistem sosial dan budaya menanam dan merawat pohon kelapa masih menggunakan pengetahuan secara tradisional dan turun temurun. Minimnya pengetahuan budidaya kelapa dalam hal pemembibitan maupun mereplanting pohon kelapa secara ilmiah berdampak pada penurunan produksi kelapa yang berujung pada sistem ekonomi keberlanjutan petani kelapa di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan setempat mengatakan bahwa perkebunan kelapa disini sudah ada sejak zaman kakek buyut masyarakat lokal sekitar tahun 1940-an bahkan lebih. Sebab, kelapa menjadi tanaman turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi dan telah menjadi identitas ekonomi masyarakat setempat.

Sistem budaya menanam petani kelapa di Kabupaten Asahan memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Jika di lihat di sektor hulu Perkebunan kelapa rakyat di Kabupaten Asahan ini, masyarakat lokal memiliki budaya dan kebiasaan tersendiri. Cara maupun pengetahuan yang dimiliki masyarakat sendiri dalam mengaplikasikan pengetahuannya baik itu di mulai dari proses pembibitan dan cara menanamnya pun yang tidak dipelajari secara ilmiah. Kebiasaan masyarakat lokal dalam hal membibit dan menanam tersebut diperoleh dari ajaran nenek moyang mereka, sehingga dapat dikatakan semuanya serba manual dan tradisional.

Gambar 1 Bibit Pohon Kelapa Siap Tanam dan Proses Replanting

Berdasarkan keterangan Pak AG, bibit kelapa unggul dipilih dari buah bertandan besar dengan kulit bersih dan menarik. Buah dibiarkan matang di pohon, kemudian disemaikan di lahan khusus hingga bertunas dan pecah daun. Bibit siap tanam saat memiliki 4–5 daun tunas dengan tinggi sekitar 80–100 cm. Pak MG selaku agen sekaligus juga sebagai petani kelapa menambahkan bahwa pembibitan masih dilakukan secara tradisional, yakni mengambil buah dari pohon yang dianggap unggul, berbuah lebat, dan berdaging tebal untuk dijadikan sumber bibit lahan baru. Praktik jual beli bibit antarpetani masih berlangsung, meskipun semakin berkurang akibat peralihan ke komoditas sawit.

Saat ini, replanting kelapa masih sangat terbatas karena petani mengandalkan pohon lama yang ada. Petani bermodal lebih umumnya hanya melakukan perawatan seperti pembersihan gulma, pemupukan, dan pembuatan parit batas untuk menjaga kondisi perakaran. Sistem parit di perkebunan kelapa di Desa Silau Lama, Silau Bonto, dan Sei Kepayang Tengah mulai diterapkan sekitar sepuluh tahun terakhir, diperoleh melalui pertukaran pengalaman antarpetani dan informasi dari luar daerah. Di beberapa wilayah seperti Desa Silau Laut, Silau Bonto, dan Sei Kepayang, pengaturan lahan dan air melalui parit digunakan untuk mendukung peningkatan produksi kelapa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak AG selaku petani kelapa yang mengatakan bahwa:

“Sistem pengelolaan lahan kelapa dengan menggunakan parit memiliki istilah lokal, yaitu *beko* dan *punggu*. Kedua istilah ini merujuk pada teknik pengaturan lahan dan air yang berfungsi untuk menjaga produktivitas serta ketahanan tanaman kelapa terhadap kondisi lingkungan. Biasanya pembuatan *punggu* ini dilakukan secara

berkala, umumnya setiap empat tahun sekali. Istilah *punggu* disini maksudnya proses penggalian atau pengangkatan tanah untuk memperdalam parit serta meninggikan permukaan lahan di sekitarnya. Fungsinya itu untuk mencegah genangan air pada musim hujan, terutama pada jenis tanah kalo orang sini bilang “tanah tanggung,” yaitu lahan yang berada di antara dataran rendah dan tinggi” (AG, wawancara 22 September 2025).

Dengan demikian, *punggu* berfungsi sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi topografi dan hidrologi setempat. Istilah *beko* mengacu pada sistem pembuatan parit panjang yang mengelilingi atau membatasi petakan lahan kelapa. Parit ini dibuat dengan kedalaman sekitar dua meter dan berisi air sepanjang waktu yang berasal dari curah hujan, bukan dibuat khusus untuk mengalirkan air dari sungai ke dalam kebun kelapa, sehingga parit disini hanya berperan sebagai sistem drainase alami. Sejalan dengan pernyataan Pak AG yang menyebutkan bahwa:

“Satu petak lahan berukuran sekitar satu hektar, parit dibuat di sisi kanan dan kiri dengan enam baris tanaman kelapa di antara keduanya. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat parit di lokasi ini beraneka ragam, yaitu berkisar Rp20.000.000-Rp23.000.000 per hektar tergantung lokasinya. Selain berfungsi sebagai penutup akar pohon, juga mengurangi resiko banjir yang diakibatkan oleh hujan sehingga dengan dilakukannya sistem parit ini diyakini petani dapat meningkatkan produksi kelapa juga” (AG, wawancara 22 September 2025).

Dari segi fungsi agronomis, sistem *beko* dianggap lebih efisien karena perawatannya hanya dilakukan sekali di awal pembukaan lahan. Setelah itu, petani hanya melakukan kegiatan rutin seperti pembabatan rumput atau penyemprotan herbisida. Istilah masyarakat lokal menyebut luas lahan perkebunan kelapa per hektar itu di lihat

berdasarkan taksiran baris pohonnya. Biasanya untuk ukuran lahan seluas 1 hektar terdapat sekitar 5-6 baris pohon kelapa dengan jumlah pohon di setiap barisnya sekitar 20-30an batang pohon kelapa dengan jarak berjejer antara pohon satu dengan pohon lainnya sekitar 8-9 meter taksiran usia pohon kelapa rakyat di kebun mereka sudah ada sejak kakek bahkan buyut mereka masih ada pohon kelapa yang sudah berusia sekitar 60 tahun lebih. Namun, para petani juga menyadari bahwa dengan semakin tua usia pohon kelapa maka semakin minim pula jumlah produksi yang dihasilkan setiap pohon kelapa tersebut.

Gambar 2. Pola Penanaman Kelapa dengan Teknik Pengaturan Lahan dan Air

Sebagian besar petani telah melakukan perawatan kebun kelapa dengan melibatkan buruh lepas atau *pengupah* dalam rantai nilai perawatan. Pengupah bekerja sesuai tugasnya, seperti membabat dan meracun rumput, pemupukan, penebangan pohon, serta pembersihan parit. Pembersihan gulma dilakukan secara berkala setiap 4–6 bulan untuk mengurangi persaingan nutrisi sehingga pertumbuhan kelapa lebih optimal, sekaligus membuka peluang kerja bagi tenaga pengupah. Upah jasa babat rumput umumnya dihitung berdasarkan jarak antar pohon dengan tarif sekitar Rp7.000 per pohon, dengan kemampuan kerja rata-rata mencapai 2 hektar per hari. Jasa meracun rumput dibayar secara bervariasi, baik per botol racun, per tangki, maupun berdasarkan luas lahan, dengan biaya relatif setara. Racun yang umum digunakan adalah Gramaxone dan aplikasi dilakukan sekitar empat bulan sekali.

Sebagian petani kelapa di Kabupaten Asahan menerapkan sistem tumpang sari, terutama kelapa dan pisang, yang telah berlangsung sekitar sepuluh tahun dan dinilai mampu meningkatkan produktivitas lahan tanpa mengganggu pertumbuhan kelapa. Perawatan

dilakukan melalui pemupukan terbatas, umumnya setiap enam bulan sesuai kemampuan modal, serta pengendalian gulma dan pengelolaan parit sebagai alternatif perawatan. Meski demikian, hasil observasi peneliti di beberapa lokasi menemukan adanya sistem tumpang sari kelapa, sawit, dan pisang yang secara agronomis kurang dianjurkan karena meningkatkan persaingan dan risiko penyakit, namun tetap dipilih petani sebagai strategi adaptif untuk menambah pendapatan dan menjaga kestabilan ekonomi rumah tangg

Gambar 3. Aneka Jenis Tanaman Tumpang Sari di Areal Perkebunan Kelapa Rakyat

Petani kelapa menyadari keterbatasan pengetahuan dan minimnya inovasi dalam pengelolaan kebun kelapa yang cenderung stagnan dari waktu ke waktu. Kurangnya perhatian terhadap komoditas kelapa, ditambah tekanan pasar global, mendorong pemerintah, korporasi, dan masyarakat beralih ke tanaman bernilai ekonomi cepat panen seperti kopi, kakao, jagung, cabai, dan terutama kelapa sawit. Ekspansi perkebunan sawit secara bertahap menggeser luas lahan kelapa karena tingginya kebutuhan ekonomi rumah tangga serta perbedaan siklus panen yang signifikan. Sawit dapat dipanen setiap dua minggu, sedangkan kelapa membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, sehingga mendorong petani menerapkan tumpang sari atau beralih ke komoditas berumur panen lebih singkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak MG yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya jika di lihat berdasarkan usia produktif dan perawatan antara kelapa dengan kelapa sawit lebih sebenarnya lebih menguntungkan menanam kelapa, karena pohon kelapa unggul di usia produksi yang bisa hidup hampir 100 tahun, biaya perawatan tidak susah dan tidak merusak lingkungan meskipun secara ekonomi masih tetap diunggulkan kelapa

sawit. Sedangkan kelapa sawit, usia produktif maksimal 25 tahun, secara intens dirawat dan dapat merusak alam.” (MG, wawancara 23 September 2025).

Kurangnya perhatian pertanian kelapa di Kabupaten Asahan ditengah permintaan kelapa yang kian meningkat menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah. Petani kelapa berharap pemerintah harus memperhatikan sistem pertanian kelapa rakyat ini karena usia kelapa di wilayah ini semakin tidak produktif sejak 4 tahun terakhir. Pak MG melanjutkan pernyataannya bahwa:

“Pemerintah harusnya melakukan riset dan turun ke lapangan untuk memperhatikan pohon kelapa masyarakat supaya bisalah dipercepat usia produktifnya karena dari dulu hingga kini kelapa baru bisa menginjak masa produktif di usia 5-7 tahun. Percepatan usia produktif kelapa khususnya sektor hulu harus adalah peningkatan kualitas atau inovasi untuk membuat bibit unggul pohon kelapa. Berkembang atau tidaknya kelapa disini, para petani kelapa sebenarnya masih berharap ada campur tangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pertanian kelapa disini apalagi sekrang harga kelapa udah makin naik” (MG, wawancara 23 September 2025).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa di Kabupaten Asahan sulit terwujud karena rendahnya kesadaran kolektif petani dalam membaca peluang dan tantangan, ditandai oleh pola kerja individual, pembibitan tradisional, ketiadaan jejaring pasar bibit, dan minimnya kelompok tani. Wawancara dengan Bapak SE menggambarkan pembagian kerja berbasis kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana tenaga kerja fokus pada perawatan kebun sementara panen menjadi tanggung jawab lain, mencerminkan struktur sosial-ekonomi kebun kelapa yang terpisah

fungsinya. Secara lebih luas, temuan ini menegaskan bahwa perkebunan kelapa rakyat merupakan praktik sosial yang terbentuk secara historis dan kultural, sehingga meskipun secara ekologis wilayah pesisir Asahan sangat potensial, keberlanjutan ekonomi hulu-hilir belum tercapai akibat keterbatasan teknologi, kelembagaan, dan desain pemberdayaan yang kontekstual (Bappenas 2024).

Di sektor hulu, budidaya kelapa di Kabupaten Asahan masih mengandalkan pengetahuan lokal turun-temurun, sehingga pembibitan dan perawatan dilakukan berdasarkan pengalaman, bukan standar ilmiah sebagaimana Pedoman Budidaya Kelapa menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 130 Tahun 2013 (Pertanian 2023), yang memperkuat temuan Sabarisman (2017). tentang kerentanan petani pesisir akibat keterbatasan akses pengetahuan, teknologi, dan modal. Praktik tradisional tersebut merefleksikan habitus kerja petani, termasuk penggunaan sistem parit lokal seperti beko dan punggu sebagai bentuk rekayasa sosial berbasis pengetahuan lokal, sejalan dengan Trimerani et al. (2024), namun belum berdampak signifikan karena tidak didukung teknologi dan kelembagaan formal. Rendahnya replanting dan dominasi pohon kelapa tua menegaskan keterbatasan modal dan pendampingan, sehingga meski petani menyadari penurunan produktivitas, mereka tidak memiliki akses bibit unggul dan pembiayaan, sebagaimana dikritik Dahlan et al. (2021) bahwa teknologi tanpa penguatan kapasitas sosial petani tidak efektif dan menandakan absennya desain rekayasa sosial yang menempatkan petani sebagai subjek transformasi.

Praktik Sosial Petani Kelapa Sektor Hilir

Sistem panen kelapa di wilayah ini umumnya menggunakan pola “*bagi lima*”, di mana tukang pengait memperoleh sekitar Rp2.000 dari harga Rp10.000 per butir, termasuk

pengaitan dan pelangsiran ke titik kumpul. Kelapa hasil panen diolah menjadi kopra, dikemas dalam karung, lalu dijual ke agen. Sementara itu, tempurung kelapa dikelola terpisah dan biasanya diolah menjadi arang oleh pekerja tertentu dengan sistem penjualan per kilogram. Pembagian keuntungan arang bergantung pada kesepakatan pemilik lahan, sehingga memberi peluang pendapatan tambahan bagi pekerja dan mencerminkan praktik ekonomi subsisten di tingkat lokal.

Panen kelapa dilakukan secara rotatif sesuai tingkat kematangan buah, bukan musiman, dengan temuan adanya buah gugur sebelum matang akibat perbedaan kesuburan pohon dan kondisi lingkungan. Sistem upah bersifat fleksibel dan berbasis relasi personal antara pemilik lahan dan pekerja, mencerminkan pola agraris tradisional yang belum terlembaga. Sejalan dengan keterangan Pak AG, interaksi antarpelani berlangsung informal tanpa kerja kolektif atau mekanisme berbagi pengetahuan karena masing-masing mengandalkan pengalaman sendiri. Dengan produksi rata-rata sekitar 600 kg per panen pada lahan sekitar 2 hektar, kondisi ekonomi petani relatif terbatas, sehingga sistem kerja pengupah berkembang sebagai strategi bertahan hidup bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan lain.

Masyarakat yang tidak memiliki lahan umumnya bekerja sebagai pengupah dengan tugas mulai dari memanen, mengupas dan membelah kelapa, mengorek kopra, mengemas dalam goni, hingga mengantarkannya ke agen. Sistem ini menjadi sumber penghidupan utama bagi mereka di tengah keterbatasan kepemilikan lahan. Pembayaran upah bergantung pada harga kopra yang ditetapkan agen berdasarkan permintaan pasar global, dengan kisaran Rp11.300–Rp11.500 per kilogram. Dari harga tersebut, upah pemanen dan pengupas sekitar Rp2.300–Rp2.500 per kilogram dipotong, sehingga pendapatan bersih petani sekitar Rp8.000 per kilogram sebelum

kopra disalurkan ke agen lokal. Pak MG menjelaskan bahwa:

“Produksi dan pemasaran petani kelapa pada umumnya menjual hasil panen di Desa Sei Kepayang Timur dalam bentuk kopra bungkil. Harga jual ke agen saat ini sekitar Rp9.500 per kilogram, dengan potongan upah tenaga kerja sebesar Rp3.000, sehingga petani memperoleh sekitar Rp6.500 per kilogram. Proses pemanenan dilakukan oleh tenaga khusus yang disebut “tukang kait”, yang bertanggung jawab mulai dari mengait buah hingga mengupas dan mengangkut hasil ke penampung” (MG, wawancara 23 September 2025).

Di Kabupaten Asahan, kelapa didiversifikasi menjadi kopra putih atau kopra basah. Setibanya di agen, kopra kembali dibersihkan oleh buruh yang dikenal sebagai “*pengoncek kelapo*.” Pelaku dalam mata rantai ini berasal dari beragam kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bagi anak-anak dan remaja, pekerjaan ini dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang sekaligus memperoleh uang tambahan.

Gambar 4. Aktifitas Pengoncek Kelapo Saat Membersihkan Kopra

Berdasarkan pada gambar 2 menunjukkan “*pengoncek kelapo*” bertugas membersihkan kulit ari cokelat agar kopra tampak putih bersih, dengan upah sekitar Rp350 per kilogram. Dalam sehari, mereka mampu membersihkan sekitar 100–200 kg kopra, bergantung pada pasokan agen. Sistem pembayaran dilakukan mingguan dengan besaran tidak tetap, sehingga pendapatan berkisar antara Rp210.000–Rp400.000 per minggu. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak MUL, menunjukkan adanya sistem pengelolaan lanjutan pada hasil samping kelapa, khususnya batok yang diolah menjadi arang. Sebagai pelaku usaha lokal, ia berperan mengumpulkan dan menyalurkan arang produksi masyarakat ke agen besar di luar

daerah seperti Medan dan Tebing Tinggi, mengatakan bahwa:

“Pengumpulan hasil dilakukan setelah mencapai volume tertentu, umumnya sekitar sembilan ton dalam satu kali angkutan (*koldisel*). Proses pengangkutan dilakukan ke daerah-daerah tempat agen besar menampung hasil olahan arang. Kalo persaingan di antara sesama agen tetap ada, terutama dalam hal penentuan harga dan jaringan pengambilan barang. Setiap agen memiliki kelompok kerja tersendiri yang mengumpulkan bahan dari petani atau pembuat arang, dan sebagian besar pengangkutan dilakukan menggunakan kendaraan milik agen. Dalam satu kelompok kerja biasanya terdapat tiga agen yang berkoordinasi dalam pengumpulan dan penyaluran barang. Proses ini berlangsung rutin setiap tiga hari sekali, tergantung pada ketersediaan bahan baku di lapangan.” (MUL, wawancara 22 September 2025).

Proses produksi arang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat. Masyarakat mengumpulkan batok kelapa dari hasil pengolahan kopra, kemudian membakarnya menjadi arang dengan cara tradisional. Jumlah yang dihasilkan bervariasi, tergantung kemampuan masing-masing rumah tangga yang sebagian hanya mampu menghasilkan sekitar 20 kilogram, sementara yang lain lebih besar. Harga jual arang di tingkat masyarakat relatif stabil, berkisar Rp7.500 per kilogram, tanpa perbedaan berarti antara arang kasar maupun halus. Namun demikian, harga pasar sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh kondisi permintaan dari agen besar. Bapak MUL juga mengatakan bahwa:

“Persaingan di antara sesama agen tetap ada, terutama dalam hal penentuan harga dan jaringan pengambilan barang. Setiap agen memiliki kelompok kerja tersendiri yang mengumpulkan bahan dari petani atau pembuat arang, dan sebagian besar pengangkutan

dilakukan menggunakan kendaraan milik *agen* (pemodal). Dalam satu kelompok kerja biasanya terdapat tiga agen yang berkoordinasi dalam pengumpulan dan penyaluran barang. Proses ini berlangsung rutin setiap tiga hari sekali, tergantung pada ketersediaan bahan baku di lapangan.” (MUL, wawancara 22 September 2025).

Dari sisi pasar, harga arang di Kabupaten Asahan berfluktuasi tajam dan tidak menentu, sehingga menyulitkan pelaku usaha karena modal telah dikeluarkan sebelum penjualan. Untuk bertahan, mereka mengandalkan strategi adaptif dan relasi ekonomi berbasis kepercayaan, termasuk sistem hutang-piutang dengan pemodal dan produsen arang yang dibayar melalui pemotongan hasil penjualan. Produksi arang bersifat padat karya dan bergantung pada ketersediaan batok kelapa, di mana masyarakat memisahkan sabut untuk dijual ke agen dan mengolah batok menjadi arang di kebun dengan izin pemilik lahan, yang kemudian dijual sekitar Rp7.000 per kilogram, sementara sebagian pelaku seperti Pak AI memilih membeli langsung bahan baku arang dari pemilik kebun atau pengupah dengan harga sekitar Rp350.000 per muatan. Pengolahan arang masih mengandalkan pembakaran terbuka yang sederhana namun berisiko bagi tanaman sekitar, sementara produk arang modern seperti briket belum berkembang akibat keterbatasan modal dan teknologi. Selain kopra putih dan arang, sabut kelapa terutama di Desa Sei Kepayang Tengah dikumpulkan untuk dijual atau diolah menjadi serabut yang dimanfaatkan pelaku UMKM rumah tangga sebagai bahan keset dan perabot sederhana.

Gambar 5. Tempat Pengumpulan Arang (sebelah kiri) dan Alat Untuk Membakar Batok Kelapa (sebelah kanan)

Penelitian ini menunjukkan bahwa rantai nilai dan diversifikasi kelapa di Asahan membentuk sistem ekonomi lokal yang kompleks tetapi

masih tradisional. Produksi kopra, arang batok, dan serabut kelapa dikelola melalui pembagian kerja informal berbasis kepercayaan antara pemilik lahan, buruh, dan pelaku usaha kecil. Meski sektor hilir membuka peluang pendapatan, pengolahan tetap berskala kecil dan terkendala modal, teknologi, serta fluktuasi harga. Keterlibatan anak-anak dan remaja sebagai buruh (*pengoncek kelapo*) menegaskan kuatnya dimensi sosial ekonomi keluarga pedesaan. Secara keseluruhan, rantai nilai kelapa menjadi penopang ekonomi rakyat Asahan, namun memerlukan penguatan kelembagaan, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah agar mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Gambar 6 Aktifitas Pengoncek Kelapo Anak-Anak Sedang Membersihkan Kopra

Temuan penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi produk kelapa di sektor hilir seperti kopra bungkil, kopra putih, arang batok, dan sabut kelapa memiliki potensi nilai tambah sebagaimana diproyeksikan Bappenas (2024), namun hingga kini masih berlangsung dalam skala rumah tangga dan terjebak dalam rantai nilai tradisional yang timpang. Struktur kerja yang hierarkis dan informal, ditandai pola bagi hasil, upah harian, serta fluktuasi harga yang dikendalikan agen dan pasar global, menempatkan petani dan buruh pada posisi tawar terlemah sekaligus mereproduksi ketimpangan struktural. Keterlibatan anak dan remaja sebagai "*pengoncek kelapo*" menegaskan bahwa ekonomi kelapa melekat pada dinamika keluarga pedesaan, sekaligus mencerminkan lemahnya perlindungan sosial dan regulasi ketenagakerjaan di sektor informal pedesaan.

Dalam konteks ini, rekayasa sosial pada petani kelapa Asahan belum terlembagakan dan masih berjalan sporadis serta individual, ditandai minimnya kelompok tani, ketiadaan

kelembagaan berbadan hukum, dan lemahnya jejaring usaha, sehingga menguatkan temuan Inka Mila Rizky (2022) serta Karimah dan Widodo (2023) bahwa kebijakan hilirisasi dan peningkatan kesejahteraan petani belum menyentuh akar masalah struktural di tingkat lokal. Akibatnya, petani mengandalkan strategi adaptif jangka pendek seperti tumpang sari atau alih komoditas ke kelapa sawit yang justru mengancam keberlanjutan kelapa rakyat. Oleh karena itu, rekayasa sosial perlu dipahami sebagai proses relasional yang mensinergikan pengetahuan lokal, struktur pasar, relasi kuasa, dan kelembagaan dengan menempatkan petani sebagai aktor utama integrasi sektor hulu-hilir, melalui pendekatan sosiologis yang menekankan transformasi struktur sosial, penguatan kelembagaan, dan inovasi teknologi kontekstual.

3. Relasi Struktur dan Agensi dalam Pemberdayaan Komunitas Petani Kelapa

Perkebunan kelapa rakyat di Kecamatan Silau Laut dan Sei Kepayang mengalami stagnasi bahkan penurunan kualitas produksi dalam empat tahun terakhir akibat degradasi kualitas air dan tanah, ketiadaan replanting, serta belum terbentuknya kelompok tani. Kondisi lingkungan dan iklim memperburuk situasi, terutama karena sebelumnya tidak dilakukan normalisasi sungai sehingga genangan air saat musim hujan memicu pembusukan tanah dan menurunkan produktivitas kelapa. Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya solidaritas sosial petani yang ditandai absennya komunitas atau kelembagaan petani kelapa, padahal keberadaan kelompok tani penting untuk memperkuat hubungan sosial, memperjuangkan kepentingan bersama, dan menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa rakyat, yang efektivitasnya sangat bergantung

pada kekuatan sistem kelembagaan yang dibangun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan komunitas petani kelapa sangat dibutuhkan, namun hingga kini belum terbentuk secara efektif untuk memperjuangkan kepentingan petani, sementara perhatian pemerintah lebih terfokus pada komoditas lain seperti sawit, kakao, dan padi. Ketiadaan kelembagaan menyebabkan petani bergerak secara individual, minim pendampingan, dan tidak memperoleh peningkatan kapasitas budidaya kelapa, mulai dari pembibitan hingga diversifikasi produk. Lemahnya struktur kelembagaan juga membuat relasi petani dengan pemerintah dan lembaga pendamping cenderung kaku, karena kelapa belum menjadi prioritas kebijakan. Sementara itu, hubungan petani dengan masyarakat dan tokoh adat masih bertumpu pada praktik tradisional berbasis kepercayaan budaya, yang meskipun bernilai lokal, belum mampu mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Perkebunan kelapa rakyat di Kabupaten Asahan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas produksi dalam empat tahun terakhir akibat tekanan ekologis, seperti degradasi air tanah, rendahnya kesuburan lahan, dan ketiadaan replanting, serta persoalan sosial berupa lemahnya solidaritas dan absennya kelembagaan petani. Kondisi ini diperparah oleh minimnya perhatian pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan komoditas lainnya, sehingga petani kelapa bekerja secara individual, bergantung pada praktik tradisional, dan tidak memperoleh akses peningkatan kapasitas budidaya. Akibatnya, usaha kelapa rakyat sulit beradaptasi dengan tuntutan pasar dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan petani kelapa menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat solidaritas, memperjuangkan hak petani, mendorong inovasi budidaya, serta

menjamin keberlanjutan ekonomi kelapa rakyat, terutama mengingat belum adanya program peremajaan dan pengembangan bibit unggul sebagaimana dikeluhkan Pak MG:

“Tidak pernah ada program peremajaan kelapa rakyat sebagaimana yang diterapkan pada komoditas sawit. Bibit unggul kelapa juga belum pernah dikembangkan secara serius oleh pemerintah. Pemerintah sekarang lebih banyak memperhatikan komoditas besar seperti sawit, sementara petani kelapa dibiarkan berjuang sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah” (MG, wawancara 23 September 2025).

Harga kelapa di tingkat petani berfluktuasi tajam akibat kebijakan ekspor yang tidak konsisten, di mana pembukaan ekspor sempat meningkatkan harga, namun pembatasan kembali menyebabkan penurunan yang merugikan petani, mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah yang lebih berorientasi pada kebutuhan perkotaan. Padahal, potensi pengolahan hilir kelapa seperti briket tempurung, serat sabut, nata de coco, dan pestisida alami sangat besar, tetapi terhambat oleh keterbatasan modal, teknologi, dan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan kelapa rakyat tetap menjanjikan apabila pemerintah menyediakan bibit unggul, teknologi pengolahan, akses ekspor yang stabil, serta memfasilitasi peran BUMDes dan koperasi agar petani tidak sekadar menjual bahan mentah dan dapat memperkuat posisi tawarnya di pasar.

Tantangan utama petani kelapa di Kabupaten Asahan bukan lagi persoalan teknis seperti hama atau cuaca, melainkan lemahnya kebijakan dan perhatian pemerintah. Setelah normalisasi sungai, gangguan hama relatif terkendali, sehingga kebutuhan mendesak justru terletak pada penyediaan bibit unggul, kebijakan ekonomi yang berpihak pada petani kelapa, serta pengendalian alih fungsi lahan ke sawit yang secara ekologis dan ekonomi kurang

berkelanjutan. Namun, temuan lapangan di Kecamatan Silau Laut dan Sei Kepayang menunjukkan bahwa agenda pemerintah lebih memprioritaskan komoditas lain seperti padi, kakao, dan terutama kelapa sawit, yang didukung melalui pembentukan komunitas, subsidi, dan pembinaan kelembagaan, sementara petani kelapa belum memperoleh perhatian serupa, sehingga memicu kecemburuan sosial dan memperlemah keberlanjutan pertanian kelapa rakyat. Pak AG juga menambahkan bahwa:

“Tidak ada perhatian pemerintah terhadap petani kelapa karena setiap petani menjalani sistem bertani masing-masing. Mulai dari belajar membibit, belajar teknik menanam, merawat, memupuk, memanen dan mengolah hasil pertanian semuanya belajar sendiri” (AG, wawancara 22 September 2025).

Berdasarkan informasi yang berkembang juga, peneliti menemukan bahwa penyuluh pertanian atau perkebunan juga tidak pernah datang dan berbincang-bincang dengan masyarakat. Peneliti menganggap bahwa wajar saja masyarakat merasa skeptis dengan pemerintah dan kebijakannya terkait perkebunan kelapa rakyat ini. Namun, ternyata masih ada pemerintah setempat yang memperhatikan perkebunan dan petani kelapa. Salah satunya di Desa Sei Kepayang Tengah, kepala desa sudah melakukan perhatian mendasar terkait perawatan lahan perkebunan kelapa. Pak SBB selaku kepala desa Sei Kepayang Tengah menjelaskan:

“Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat petani kelapa di Desa Sei Kepayang Tengah adalah menurunnya produktivitas hasil pertanian akibat kondisi sungai yang mengalami pendangkalan. Sejak saya menjabat sebagai kepala desa, ia membuat program normalisasi sungai secara bertahap setiap tahun. Setelah dua tahun pelaksanaan, perubahan mulai terlihat kualitas dan hasil

panen kelapa menunjukkan peningkatan. Desa Sei Kepayang Tengah sebenarnya terdapat sekitar 50 kilometer aliran sungai yang harus dinormalisasi. Dalam tahun pertama, hanya sekitar 2 kilometer yang dapat dikerjakan menggunakan sisa anggaran desa (Silpa). Tahun-tahun berikutnya, kegiatan tersebut terus berlanjut hingga sebagian besar sungai dapat dinormalisasi, dan tanah hasil galian digunakan untuk peninggian badan jalan perkebunan. Dampaknya, akses transportasi petani kini jauh lebih baik; jalan tidak lagi tergenang lama saat musim hujan dan kegiatan panen dapat berjalan lancar” (SBB, wawancara 23 September 2025).

Sejak 2021 pemerintah desa melakukan normalisasi parit perkebunan kelapa untuk memperbaiki aliran air dan kesuburan tanah, namun akses jalan ke kebun masih rusak sehingga menghambat mobilitas petani. Temuan lapangan di Kecamatan Silau Laut dan Sei Kepayang menunjukkan bahwa penurunan produksi kelapa dalam empat tahun terakhir dipengaruhi tidak hanya oleh faktor ekologis, tetapi juga oleh lemahnya pendampingan, meningkatnya ekspansi sawit sebagai pilihan ekonomi cepat, ketiadaan replanting dan kelompok tani, serta minimnya perhatian kebijakan daerah. Kondisi ini membuat petani bertumpu pada praktik tradisional dan bekerja secara individual, yang mencerminkan belum optimalnya rekayasa sosial berbasis pengetahuan ilmiah untuk mendorong perubahan sosial dan keberlanjutan usaha kelapa rakyat (Maliki 2012).

Ditinjau melalui teori strukturasi, kondisi ini mencerminkan ketimpangan relasi antara struktur dan agensi. Kebijakan pertanian daerah yang lebih memprioritaskan komoditas seperti sawit dan kakao membatasi ruang gerak petani kelapa, sehingga mereka cenderung mereproduksi praktik lama alih-alih mentransformasi sistem. Padahal, menurut

Giddens, petani merupakan aktor sosial yang berpotensi mengubah struktur melalui praktik sehari-hari (Wirawan 2015). Hal ini terlihat kontras dengan kasus Desa Sei Kepayang Tengah, di mana inisiatif kepala desa sejak 2021 dalam menormalisasi sungai mampu memperbaiki kualitas lahan, akses, dan hasil panen, menunjukkan bahwa agensi lokal dapat memicu perubahan struktural pada tingkat mikro.

Temuan ini selaras dengan penelitian Trimerani et al. (2024) yang menekankan pentingnya integrasi pemberdayaan, penguatan kelembagaan, interaksi sosial, dan pendekatan techno-social yang belum terwujud di Asahan. Hasil penelitian ini juga menguatkan Dahlan et al. (2021) bahwa teknologi tidak efektif tanpa kapasitas SDM dan kelembagaan yang kuat. Selain itu, lemahnya hilirisasi dan fluktuasi harga kelapa sejalan dengan temuan Rizky (2022) serta Karimah dan Widodo (2023) yang menegaskan peran krusial kebijakan, infrastruktur, dan pasar yang berpihak. Dengan demikian, rekayasa sosial petani kelapa menuntut penguatan struktur kelembagaan agar agensi petani mampu berperan sebagai aktor transformasi sosial yang berkelanjutan.

4. Implikasi Kesejahteraan Petani Kelapa dan Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Sektor Perkebunan Kelapa

Kabupaten Asahan memiliki potensi besar pengembangan kelapa rakyat karena dukungan kondisi geografis, iklim, dan luas lahan, namun potensi tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani akibat praktik budidaya yang masih tradisional, keterbatasan teknologi dan akses pasar, serta lemahnya kelembagaan. Meski nilai gotong royong masih bertahan, petani bekerja secara individual sehingga posisi tawar rendah dan bergantung pada tengkulak. Oleh karena itu, rekayasa sosial

menjadi strategi kunci melalui penguatan kelembagaan petani, pemanfaatan pengetahuan lokal sebagai basis inovasi, serta pengembangan usaha hilir produk turunan kelapa, yang perlu didukung kebijakan partisipatif agar perubahan sosial dan ekonomi berlangsung berkelanjutan yang berimplikasi pada kesejahteraan keluarga petani kelapa. Untuk memperjelas analisis penelitian ini, peneliti memberikan rangkuman keberlanjutan usaha kelapa rakyat yang di lihat berdasarkan aspek kondisi wilayah, sistem budidaya, pekerja anak, kelembagaan petani, kebijakan pemerintah dan regenerasi petani yang berimplikasi pada kesejahteraan keluarga petani dapat di lihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1: Analisis Keberlanjutan usaha kelapa rakyat dan kesejahteraan keluarga petani kelapa

N o	Aspek Utama	Temu an Lapan gan	Analisis Penelitian	Implika si Kesejah teraan Keluarg a Petani
1	Kondisi Wilayah	Lahan subur dan iklim mendukung, namun pengelolaan masih tradisional.	Potensi besar belum dimanfaatkan optimal karena keterbatasan teknologi dan modal.	Pendapatan keluarga belum stabil, kesejahteraan rendah.
2	Sistem Budidaya	Banyak pohon kelapa	Produktivitas menurun akibat	Pendapatan menurun,

		tua, tanpa replanting dan perawatan ilmiah.	pengetahuan pertanian terbatas.	memicu ketergantungan ekonomi keluarga.
3	Pekerja Anak di Bawah Umur	Anak-anak membantu panen dan pengolahan kopra.	Strategi ekonomi keluarga untuk menekan biaya, namun melanggar prinsip sosial.	Mengorbankan pendidikan anak dan memperkuat kemiskinan struktural.
4	Kelembagaan Petani	Tidak ada koperasi atau kelompok tani aktif.	Lemahnya <i>social capital</i> meurunkan posisi tawar petani.	Akses modal dan pelatihan minim, kesejahteraan kolektif tidak meningkat.
5	Kebijakan Pemerintah	Fokus pada sawit dan padi, kelapa kurang mendapat	Terjadi <i>policy gap</i> antara potensi dan dukungan pemerintah.	Petani sulit berkembang, ketimpangan ekonomi

		perhatian.		meningkat.
6	Regenerasi Petani	Generasi muda enggan bertani kelapa, banyak lahan beralih ke sawit.	Menunjukkan krisis regenerasi dan menurunnya daya tarik pertanian.	Mengancam keberlanjutan ekonomi desa dan stabilitas keluarga petani.

Sumber: Data Primer Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1, temuan lapangan menunjukkan bahwa besarnya potensi sumber daya alam belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan keluarga petani akibat pengelolaan yang masih tradisional, minim replanting, keterbatasan teknologi dan modal, serta absennya kelembagaan, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan stagnasi pendapatan. Secara sosiologis, peneliti mengalisis bahwa rendahnya kesejahteraan petani kelapa Asahan bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, melainkan oleh struktur sosial-ekonomi yang lemah, seperti minimnya kebijakan afirmatif, dominasi tengkulak, dan ketiadaan kelembagaan petani.

Dalam kerangka teori strukturasi, agensi petani memang tetap berjalan melalui strategi bertahan jangka pendek berbasis praktik tradisional dan tenaga kerja keluarga, namun justru mereproduksi ketimpangan dan kemiskinan antar generasi. Sejalan dengan Bourdieu, keterbatasan modal ekonomi, sosial, dan budaya membentuk habitus subsisten dalam ranah pertanian yang subordinat. Karena itu, rekayasa sosial perlu diarahkan pada

penguatan kelembagaan, transformasi habitus, dan penataan kebijakan agar petani mampu menjadi aktor perubahan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Oleh sebab itulah peneliti merekomendasikan model rekayasa sosial pada komunitas petani kelapa diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, solidaritas sosial, dan keberlanjutan sistem pertanian rakyat melalui pemberdayaan masyarakat, dengan strategi utama berupa penguatan organisasi petani, transformasi budaya pertanian berbasis pengetahuan, pengembangan ekonomi kolektif melalui koperasi atau BUMDes, serta integrasi pengetahuan lokal dengan inovasi modern.

Pendekatan ini juga menekankan kolaborasi antara petani dengan pemerintah, diversifikasi ekonomi berbasis inovasi lokal, revitalisasi gotong royong, dan regenerasi petani muda melalui agribisnis dan digitalisasi, sehingga usaha kelapa rakyat berpotensi menjadi motor pembangunan pedesaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di tingkat lokal maupun nasional yang dapat di lihat pada gambar berikut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainul. 2021. "Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian." *Indonesian Treasury Review* 6(2):117–38.
- Afnani, Nurul afis, Agus Arifin, and Ratna Setyawati Gunawan. 2020. "The Decision Of Coconut Sugar Producers In Taking People Business Credit At Bank Rakyat Indonesia." *International Sustainable Competitiveness Advantage* 546–57.
- Astuti, Arum Tri, and Mahendra Wijaya. 2020. "Peran Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya &

Lingkungan Hidup (LPPSLH) Dalam Pemberdayaan Petani Penderes." *Jurnal Analisa Sosiologi* 9:360–75.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. 2022. *Kabupaten Asahan Dalam Angka 2022*. edited by M. F. Ginting, A. F. R. Tamba, L. C. Murti, and M. RYH. Kisaran: BPS Kabupaten Asahan.

- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Asahan. 2025. "Kabupaten Asahan Dalam Angka Tahun 2025." 588.

- Bappenas. 2024. *Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045*. Vol. 11. edited by L. A. A. Sambodo, Teguh. Jakarta Pusat: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

- Dahlan, Srisasmita, Abigael R. Tondok, and Repelita Kallo. 2021. "Review: Rekayasa Sosial Dan Keberdayaan Petani." *Jurnal Agrisistem : Seri Sosek Dan Penyuluhan* 17(2):87–93. doi:10.52625/j-agr-sosekpenyuluhan.v17i2.208.

- Ikhwan, Rizghina, Syahyuti, and Sri Suharyono. 2023. "Rekayasa Sosial Pada Usaha Tani Beresponsif Gender Di Kawasan Program Food Estate, Provinsi Kalimantan Tengah." *Analisis Kebijakan Pertanian* 21(1):133–44.

- Kamim, Anggalih Bayu Muh. 2019. "Paradok Kemaritiman DIY, Ilusi Kesejahteraan Di Balik Upaya Rekayasa Sosial." *Jurnal Analisis Sosial* 23(2):72–91.

- Kariyasa, Ketut. 2005. "Sistem Integrasi Tanaman-Ternak Dalam Perspektif Reorientasi Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Peningkatan Pendapatan Petani." *Analisis Kebijakan Pertanian* 3(1):68–80.

- Karouw, Steivie, Budi Santosa, and Ismail Maskromo. 2019. "Processing Technology of Coconut Oil and Its By Products." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*. doi:<https://doi.org/10.21082/JP3.V38N2.2019.P86-95>.
- Khusnul, Nindya, and Ageng Widodo. 2023. "Upaya Mensejahterakan Petani Gula Kelapa Melalui Sertifikasi Organik (Studi Kasus Di Desa Pasinggangan, Banyumas)." *Jurnal Kommunitas Online* 2(2):13–24. doi:10.15408/jko.v2i2.22602.
- Kurniawan, A'ang. 2013. "Pemberdayaan Petani Kelapa Di Desa Sungai Rengas." *PubliKA, Jurnal SI Ilmu Administrasi Negara* 2(2).
- Maliki, Zainul. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Naamy, Nazar. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. I. edited by Winengan. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, LP2M UIN Mataram.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and M. Win Afgani. 2016. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(17):826–33. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Nurhanifa, Ira, and Budiasih Budiasih. 2023. "Efisiensi Teknis Dan Total Faktor Produktivitas Sektor Pertanian Di Jawa Tahun 2020." *Seminar Nasional Official Statistics* 2023(1):547–56. doi:10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1715.
- P., Jamaluddin, Husain Syam, Nunik Lestari, and Muhammad Rizal. 2019. *Alat Dan Mesin Pertanian*. Pertama. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Perdana, Adhi Surya. 2016. "Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Pasar Lelang Sebagai Solusi Mewujudkan Kedinamisan Kesejahteraan Petani." *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika* 1(1):52–63.
- Pertanian, Kementerian. 2023. *Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2023*.
- Putnam, R. D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Raho, B. 2013. *Sosiologi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Nusa Indah.
- Rizky, Inka Mila. 2022. "Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Hilirisasi Kelapa Bulat (Coconut) Dan Produk Turunannya." Universitas Sriwijaya.
- Sabarisman, Muslim. 2017. "Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir." *Sosio Informa* 3(3):216–35. doi:10.33007/inf.v3i3.707.
- Scott, J. C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: CV. Alfabeta.
- Trimerani, Resna, Gani Supriyanto, Arief Ika Ulkoro, Andreas Wahyu Krisdiarto,

Adi Ruswanto, Reza Widyasaputra,
Mohammad Prasanto Bimantio, and
Herawati Oktavianty. 2024. "Desain
Rekayasa Sosial Pada Pengrajin Gula
Kelapadi Desa Kalak Kecamatan
Donorojo Kabupaten Pacitan." *Jurnal
Abdimas Kartika Wijayakusuma*
5(2):314–22.
doi:10.26874/jakw.v5i2.410.

Wirawan, I. B. 2015. *Teori-Teori Sosial Dalam
Tiga Paradigma*. 4th ed. edited by Y.
Rendy. Jakarta: Prenadamedia Group.